

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perdagangan internasional khususnya kajian mengenai ekspor-impor tidak dapat lepas dari perjanjian-perjanjian atau regulasi yang dilahirkan oleh organisasi internasional. Regulasi-regulasi yang disepakati dalam World Trade Organization (WTO) bersifat mengikat bagi negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia. Rezim perdagangan internasional telah melegalkan WTO menjadi satu-satunya lembaga dunia yang memiliki kredibilitas dalam mengatur perekonomian internasional. Berada di bawah organisasi PBB, kebijakan yang dihasilkan WTO seringkali hanya menguntungkan Negara-negara maju dan justru menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah regulasi mengenai standarisasi mutu produk ekspor, termasuk didalamnya mutu manajemen perusahaan. Tujuan dari munculnya regulasi standarisasi ini pada dasarnya diarahkan sebagai unsur penunjang pembangunan. Standarisasi mempunyai peranan penting dalam usaha mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dalam kegiatan pembangunan. Standarisasi berperan pula dalam menunjang kemampuan produksi khususnya peningkatan perdagangan internasional, serta pengembangan industri dan perlindungan konsumen. Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional yang turut meratifikasi kerangka WTO ini, dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu Indonesia tanpa tawar menawar, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan kerangka atau regulasi-regulasi dikeluarkan oleh WTO.¹

Disisi lain, kebijakan standarisasi internasional justru menjadi hambatan dalam perdagangan internasional, khususnya bagi Negara berkembang dimana industri didominasi jumlahnya oleh industri kreatif yang dikelola secara swadaya.

¹ Sutiarnoto MS, 2001, *Tantangan dan Peluang Investasi Asing*, Jurnal Hukum, Vol 6 No. 3, Agustus, hal. 271

Standardisasi masuk dalam kategori hambatan non tarif (*nontariff barrier*) yang oleh kalangan kritikus ekonomi internasional dianggap sebagai upaya negara untuk melindungi kepentingan ekonomi domestiknya terhadap produk-produk impor yang masuk ke negaranya. Kajian mengenai hambatan non tarif mengenai kebijakan standardisasi sampai detik ini masih sangat sering dikaji karena pengaruhnya yang berdampak pada penurunan angka ekspor bagi beberapa negara anggota WTO, khususnya negara berkembang, yang kesulitan memenuhi tingginya standardisasi pasar internasional. Kesimpulannya adalah standardisasi internasional memang diperlukan dalam perdagangan internasional selama tingkat standar yang disepakati memungkinkan untuk dapat dipenuhi oleh negara-negara anggota WTO lainnya. Sebaliknya jika standar yang diberlakukan terlalu tinggi maka justru akan menghambat kegiatan perdagangan internasional suatu negara.

Konsekuensi keanggotaan dalam organisasi internasional sebelum mengesahkan suatu perjanjian internasional, yaitu: *Pertama*, Negara harus menerjemahkan atau mentransformasikan kewajiban dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Ini berarti berbagai produk nasional yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional wajib untuk diamendemen. Transformasi ini adalah untuk memastikan agar tidak ada ketentuan yang berbenturan (*conflicting*) antara hukum nasional atau domestik dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. *Kedua*, konsekuensi yang harus diperhatikan adalah kewajiban negara memberikan laporan ke suatu lembaga yang ditentukan dalam perjanjian internasional. Dalam sejumlah perjanjian internasional yang bersifat multilateral terdapat kewajiban negara peserta untuk melaporkan kemajuan (*progress*) yang telah dilakukan. Sebelum meratifikasi perjanjian internasional perlu untuk diketahui kapasitas aparat penegak hukum.²

Berada dalam sebuah rezim perdagangan internasional, Indonesia dengan keanggotaannya di WTO tidak bisa tidak untuk ikut mengimplementasikan

² Sadikin, 2010 *Ratifikasi Perjanjian Internasional Dalam Kaitannya Dengan Program Legislasi Nasional*, jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

kebijakan yang dihasilkan oleh WTO, dalam hal ini terkait kebijakan standarisasi mutu produk ekspor. Dampak adanya legalitas kebijakan standarisasi adalah muncul persyaratan mutu yang terlalu tinggi yang dikehendaki negara pengimpor, jumlah dengan mutu yang tidak memenuhi quota, persaingan internasional, perubahan harga yang terlalu cepat, pemasaran tidak langsung yang merugikan negara produsen, adanya proteksi di negara pengimpor dan batas quota dan penolakan komoditas ekspor atau *claim* oleh negara pengimpor.³ Hal ini tentu sudah menjadi kalkulasi maupun pertimbangan yang serius oleh pemerintah Indonesia sebelum meratifikasi kebijakan standarisasi dan mengintegrasikannya dalam sistem standar domestik.

Salah satu maksud dibalik penerapan standarisasi mutu adalah untuk meningkatkan kualitas produksi dengan memanfaatkan teknologi sehingga produk yang dihasilkan dinilai lebih aman bagi konsumen. Dalam poin inilah pemerintah Indonesia meyakinkan diri sendiri akan mampu mengikuti segala bentuk konsekuensi yang muncul pasca diratifikasinya kebijakan standarisasi. Sebagai Negara produsen, Indonesia harus memfasilitasi industrinya dengan mesin-mesin produksi yang layak untuk dapat memenuhi standar yang diinginkan pasar.

Menjadi tugas yang tidak mudah bagi Negara-negara berkembang untuk secepatnya merealisasikan hal ini mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Lebih jauh lagi hal ini memungkinkan masuknya investor asing dari Negara maju untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor industri di Negara berkembang. Pada akhirnya muncul ketergantungan Negara berkembang pada Negara maju. Rezim perdagangan internasional yang dimotori oleh WTO melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan seolah menguatkan ketergantungan Negara-negara berkembang terhadap Negara industri maju.

Standarisasi yang disepakati dalam WTO pada dasarnya bukan kebijakan yang baru dikaji dalam beberapa tahun terakhir, namun kebijakan ini telah banyak dibicarakan sejak tahun 1960an dimana saat itu WTO masih bernama GATT

³ *Standar Mutu dan Tantangan Keberhasilan FTA*, <http://www.fajarpos.com/berita/ekonomi.htm>, diakses pada tanggal 2 September 2016

(*General Agreement on Tariffs and Trade*). Artinya bahwa tuntutan standar internasional telah muncul sejak lama. Jika melihat pada upaya pemerintah Indonesia mengatur mutu produk ekspor baru pada awal tahun 2000 muncul kesungguhan untuk mengelola standardisasi nasional. Jelas sebagai sebuah keterlambatan yang hasilnya sebenarnya sudah dapat diduga bahwa industri dan pertumbuhan ekspor Indonesia berjalan lambat.

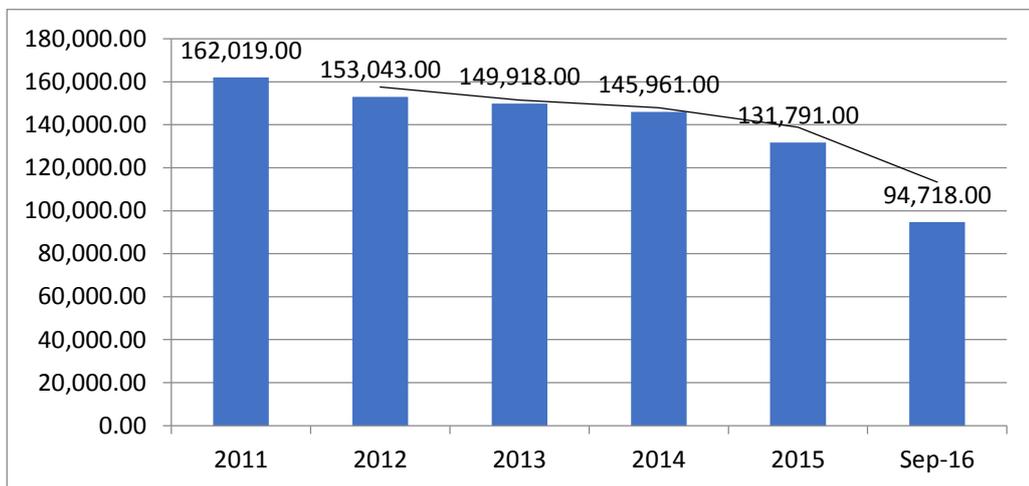
Pemerintah Indonesia dengan status keanggotaannya dalam WTO harus ikut mengaplikasikan kebijakan WTO dengan meratifikasi kebijakan dan menerapkan dalam sistem ekonomi domestik. Pemerintah Indonesia harus segera memfasilitasi kebijakan standardisasi dengan peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang mencakup Metrologi Teknik (Standar Nasional Satuan Ukuran dan Kalibrasi), Standar, Pengujian, dan Mutu untuk mengatur standardisasi mutu produk ekspor. Konsep tersebut mengacu pada konsep internasional tentang *Measurement, Standard, Testing and Quality Management (MSTQ) Infrastructure*. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi terbentuknya sistem standar nasional yang akan mendukung peningkatan mutu produk ekspor dari Indonesia.

Dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah harus melakukan kajian mendalam terlebih dahulu pada kondisi masyarakat Indonesia secara luas. Kebijakan dihasilkan tentu dengan tujuan yang positif, dalam hal ekonomi memberi keuntungan lebih, sehingga tidak hanya terkesan sebagai reaksi spontan dalam menjawab tuntutan rezim perdagangan internasional, melainkan harus menjadi solusi sistematis yang mampu mengangkat perekonomian Indonesia. Kebijakan tidak hanya berhenti pada dikeluarkannya aturan perundang-undangan namun harus mampu diimplementasikan dengan baik melalui upaya-upaya sistematis seperti penambahan sumber daya, penguatan infrastruktur, dan koordinasi serta hubungan yang bersinergi antara pelaku industri dan pemerintah berjalan dengan baik. Khusus dalam peningkatan kualitas ekspor menuju standar pasar global pemerintah Indonesia memerlukan fasilitas pendukung, utamanya

modal. Kebutuhan modal ini memunculkan ketergantungan pada modal asing. Dari sini kemudian muncul dugaan awal penyebab perlambatan ekspor yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah mengatur neraca pembayaran negara.

Kegiatan ekspor akan tetap menempati peranan penting sebagai penggerak ekonomi dalam negeri. Oleh sebab itu arah kebijaksanaan di bidang perdagangan ekspor ditujukan untuk meningkatkan ekspor barang khususnya komoditi non migas. Pada penelitian ini secara khusus peneliti akan mengkaji komoditi ekspor non migas dengan pertimbangan objek penelitian yang mengarah pada industri non migas.

Gambar 1. Penurunan Ekspor Non Migas Indonesia 2011-September 2016



Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2016

Lebih spesifik kajian penelitian ini menyorot ekspor komoditi perikanan indonesia yang disejumlah negara didapati kasus penolakan produk perikanan dari indonesia menyangkut mutu produk. Untuk mengatasi situasi yang tidak menguntungkan maka pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap ekspor migas yaitu dengan mengadakan diversifikasi penerimaan ke arah peningkatan produksi serta peningkatan ekspor komoditi dan jasa-jasa non migas.

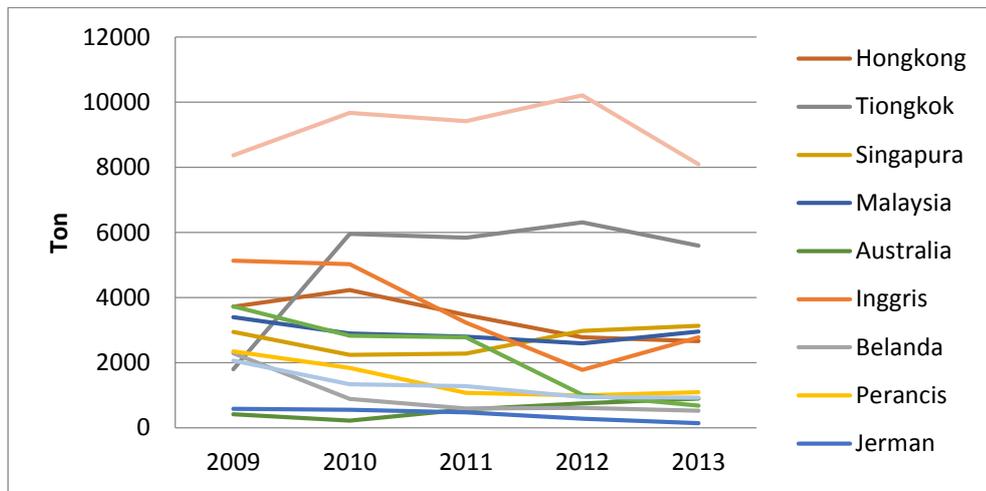
Sumber daya alam Indonesia dari sektor kelautan sangat potensial dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Bukan hanya mampu menutup kebutuhan domestik namun juga mampu memenuhi permintaan pasar internasional. Peluang pengembangan usaha perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat tinggi.

Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai USD 82 miliar per tahun.⁴ Realisasi potensi perikanan ini mendapat tantangan standarisasi ekspor yang tidak bisa dianggap sebelah mata dari pasar internasional. Terdapat fakta dimana produk Indonesia banyak mendapat penolakan dari pasar internasional. Penolakan produk ekspor Indonesia oleh Negara pengimpor salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan hasil pengujian di dalam negeri dan hasil pengujian yang dilakukan oleh negara pengimpor, serta ketidakmampuan pengujian di dalam negeri karena lemahnya infrastruktur pengukuran nasional yang mengatur tentang metrologi, pengujian, dan pengontrolan kualitas produk. Lemahnya infrastruktur pengukuran nasional dapat menjadi sasaran politik dagang negara tujuan ekspor untuk merendahkan nilai produk atau bahkan menolak produk ekspor Indonesia.

Sebagai contoh, standarisasi mempengaruhi jumlah maupun volume ekspor udang Indonesia ke pasar Uni Eropa. Pada 2009 jumlah ekspor mencapai 14.013 ton udang. Tahun berikutnya volume ekspor menurun, sehingga hanya 12.191 ton. Padahal Eropa mengimpor 470 ribu ton udang setiap tahunnya.⁵ Pada periode tahun 2009-2013 ekspor udang Indonesia ke Jerman akhir benar-benar konsisten mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 2037 ton saja sedangkan jumlah transaksi hanya sebesar US\$ 17.855. Berikut data BPS mengenai ekspor udang ke sejumlah Negara pada tahun 2009-2013:

Gambar 2. Ekspor Udang Indonesia ke Uni Eropa tahun 2009-2013

⁴ <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>, diunduh pada 28 Desember 2016
⁵ <https://m.tempo.co/read/news/2011/09/20/090357253/pengusaha-desak-solusi-hambatan-nontarif-ke-eropa>. Diakses pada tanggal 5 November 2016

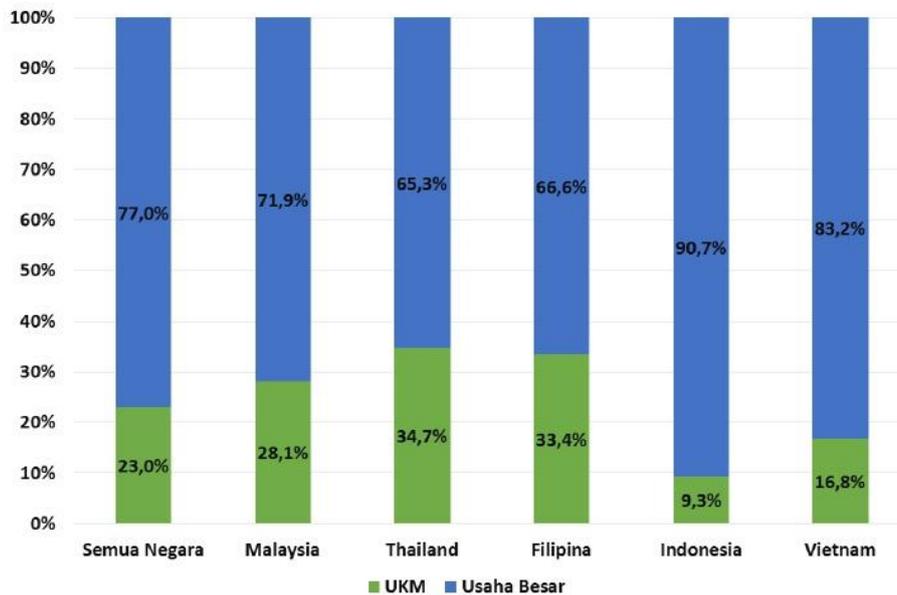


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Penolakan produk perikanan Indonesia ke pasar potensial internasional haruslah mendapat perhatian lebih intensif dari pemerintah Indonesia sebab jika hal ini tidak ditangani dalam jangka pendek kedepan akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekspor. Indikasi lain yang menjadi permasalahan terkait standar pasar adalah kontribusi ekspor oleh perusahaan domestik atau perusahaan berjenis modal dalam negeri (non modal asing) yang masih rendah. Dengan menggunakan data *World Bank Enterprise Survey* yang mencakup 5.900 perusahaan pada lima negara ASEAN, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Vietnam, didapati kontribusi ekspor UKM Indonesia adalah yang terendah dibandingkan dengan empat negara ASEAN lain. Kontribusi ekspor UKM Indonesia hanya 9,3 persen, kontras dengan UKM Thailand, Filipina, dan Malaysia yang mampu berkontribusi diatas 28,1 persen terhadap total ekspor. Bahkan kontribusi UKM Indonesia terhadap total ekspor masih tertinggal dibawah UKM Vietnam dengan kontribusi sebesar 16,8 persen.⁶

⁶ Wignaraja, G., Jinjark, Y, 2015, *Why do SMEs not borrow more from banks? Evidence from the People's Republic of China and Southeast Asia*. ADBI Working Paper 509.

Gambar 3. Kontribusi Ekspor UKM dan Perusahaan Besar



Sumber: Wignaraja, 2012

Menarik untuk menganalisis langkah pemerintah Indonesia yang meratifikasi kebijakan standardisasi mutu produk ekspor namun pada saat sekarang ini justru disebut sebagai salah satu alasan penyebab melambatnya ekspor perikanan Indonesia ke pasar-pasar potensial yang didominasi oleh negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dengan potensi sumber daya perikanan yang sedemikian luas seharusnya Indonesia mampu menjadi raja dalam ekspor komoditi ikan ke seluruh dunia. Namun sampai saat ini proses ke arah tersebut berjalan lambat seiring dengan dikeluarkannya perjanjian-perjanjian perdagangan yang justru menjadi penghambat pertumbuhan ekspor komoditi sektor perikanan Indonesia. Kajian ini diharapkan mendukung pemerintah dalam mengoptimisasi ekspor perikanan Indonesia dengan menunjukkan titik permasalahan yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah jika komoditi perikanan Indonesia ingin tetap bertahan ditengah diberlakukannya regulasi standardisasi mutu produk ekspor oleh pasar internasional.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas peneliti menentukan pertanyaan penelitian ini adalah “Mengapa kebijakan internasional mengenai standardisasi mutu produk ekspor menghambat peningkatan volume ekspor perikanan Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah pemerintah Indonesia dalam meratifikasi kebijakan internasional mengenai standardisasi mutu produk ekspor
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika ekspor perikanan Indonesia ditengah diberlakukannya kebijakan standardisasi mutu produk ekspor oleh pasar internasional.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti terait dengan isu-isu perdagangan internasional, khususnya kajian standardisasi mutu ekspor. Penelitian ini secara umum membicarakan kedudukan Indonesia sebagai bagian dari rezim perdagangan internasional yang harus tunduk pada regulasi organisasi perdagangan internasional (WTO) dan konsekuensinya terhadap peningkatan ekspor komoditas perikanan Indonesia. Pada Bab II dari penelitian ini dijelaskan mengenai rezim perdagangan internasional, utamanya dalam regulasi standardisasi mutu produk ekspor. Sedangkan penerapan regulasi standardisasi tersebut di Indonesia dan pengaruhnya bagi aktifitas ekspor Indonesia dijelaskan dalam Bab III. Analisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi standardisasi mutu produk ekspor yang justru menjadi penghambat ekspor perikanan Indonesia dijelaskan pada Bab IV dengan menggunakan teori ketergantungan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pemerintah terutama pemerintah Indonesia dalam mengelola ekspor untuk mempertahankan daya saing produk ekspor Indonesia ditengah berlakunya standardisasi pasar internasional. Secara praktis kontribusi pada Bab II bisa digunakan untuk mengetahui standardisasi pasar internasional yang harus diterapkan pada aktivitas ekspor di Indonesia. Bab III dapat digunakan untuk memberikan gambaran kondisi ekspor Indonesia pasca diberlakukannya kebijakan standardisasi mutu produk ekspor. Dan poin utama dalam penelitian ini yang dijelaskan pada Bab IV dapat digunakan untuk mengetahui titik-titik permasalahan dalam ratifikasi dan pelaksanaan kebijakan standardisasi mutu produk ekspor di Indonesia yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga tujuan positif diratifikasinya kebijakan tersebut dapat tercapai.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian ini murni dilakukan oleh penulis dengan mengembangkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi regulasi internasional mengenai standardisasi mutu produk ekspor dengan menghubungkan dengan kondisi ekspor Indonesia. Kebaruan dalam data (data dokumen dan lapangan) menjadi poin pembeda lainnya yang semakin menguatkan originalitas penelitian ini.

F. Studi Pustaka.

Membicarakan tentang konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hikmahanto Juwana dengan judul “*Konsekuensi Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Internasional*”, memaparkan beberapa alasan mengapa Indonesia perlu ikut serta dalam sejumlah perjanjian internasional, yaitu: upaya mengangkat citra Indonesia di dunia internasional, desakan dari para penggiat lembaga swadaya masyarakat, tekanan masyarakat internasional hingga kebutuhan nyata. Alasan yang

dikemukakan Hikmahanto Juwana mengenai perlunya Indonesia mengikuti regulasi internasional menjadi dasar diratifikasinya standardisasi mutu produk ekspor memerlukan tindak lanjut sebagai evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut oleh pemerintah. Penelitian ini akan menjadi penelitian lanjutan yang memberi penjelasan proses ratifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan standaridisasi mutu produk ekspor di Indonesia.⁷

Hikmahanto Juwono dalam penelitian ini tidak menjelaskan tentang adanya penetrasi asing dari rezim perdagangan internasional yang membuat negara tidak bisa menghindari kebijakan yang dihasilkan oleh organisasi internasional. Hikmahanto Juwono memandang kebijakan internasional akan selalu memberi dampak positif dalam tatanan pegaulan Indonesia di kancan internasional. Disinilah letak perbedaan pada tesis ini dengan penelitian Hikmahanto Juwono, dimana tesis ini memberi gambaran adanya tekanan internasional kepada negara yang seolah memaksa untuk diratifikasi, bahkan dalam waktu yang singkat dari diberlakukannya kebijakan oleh organisasi internasional dibawah PBB.

Situasi penolakan produk ekspor indonesia terkait mutu produk diceritakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lely Rahmawaty, Winiati P. Rahayu dan Harsi D. Kusumaningrum dengan judul "*Pengembangan Strategi Keamanan Produk Perikanan Untuk Ekspor Ke Amerika Serikat, Food Safety Strategy Development of Fishery Products Export to the United States*, (2013) menjelaskan bahwa Indonesia telah mewajibkan rantai pasok produk perikanan dengan menerapkan sistem mutu HACCP melalui Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsep HACCP pada tahun 1998 (Kementan-RI 1998), namun masih terdapat produk perikanan yang ditolak di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 146 kasus penolakan dari FDA (*Food and Drug Administration*). Sebanyak 64% kasus penolakan disebabkan adanya bakteri patogen maupun toksin yang dihasilkan seperti histamin, 26% disebabkan filthy, 6% disebabkan adanya residu kimia, dan 4% disebabkan

⁷ Juwana, Hikmahanto, 2013, Konsekuensi Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Internasional, *Journal Law Riview*. Vol. VIII, No. 2, November 2008. Hal. 232- 251, Jakarta

misbranding. Penolakan produk perikanan terbesar di AS disebabkan adanya kontaminasi bakteri patogen (termasuk Salmonella) dan *filthy*.⁸

Penelitian Lely Rahmawati, dkk, memaparkan kasus penolakan komoditas ekspor Indonesia dengan cukup baik namun tidak mengkaji situasi proses produksi domestik yang kompleks. Tesis ini melengkapinya dengan memaparkan kondisi ketidakefektifan pada proses produksi dalam negeri dalam menjawab regulasi standarisasi mutu produk ekspor.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Victor Tulus Pangapoi Sidabutar (2013) dengan judul “*Peluang dan Permasalahan yang Dihadapi UKM Berorientasi Ekspor*”, mengkaji hambatan internal dan eksternal yang dihadapi UKM dalam proses ekspor, yaitu: a) Hambatan internal, yaitu hambatan yang melekat pada UKM itu sendiri, antara lain adalah: keterbatasan SDM, keterbatasan akses ke sumber daya produktif (permodalan/pembiayaan, pasar, dll), rendahnya kemampuan UKM dalam riset dan pengembangan (untuk pasar), masih banyak UKM yang tidak memiliki Badan Hukum, b) hambatan eksternal, tidak stabilnya pasokan & harga bahan baku/pendukung lainnya, implikasi perdagangan bebas (hambatan tariff & non tariff barriers, skala & standar kualitas pasar ekspor yang sulit dipenuhi UKM seperti isu lingkungan/HAM/TK), lifetime produk UKM pendek, kurangnya akses UKM terhadap pasar luar negeri, infrastruktur pendukung ekspor belum merata, masih terdapat biaya-biaya tidak terduga terkait dengan transportasi, keamanan dll, situasi politik, sosial, ekonomi di luar negeri, dan tingginya biaya modal dibandingkan dengan negara-negara pesaing.⁹

Victor Tulus Pangapoi Sidabutar memaparkan hambatan perusahaan kecil dan menengah dalam aktifitas ekspor dengan menempatkan penelitiannya pada UKM semata sebagai objek analisisnya. Penelitian ini mengkaji objek-objek

⁸ Lely Rahmawaty, Winiati P. Rahayu, dan Harsi D. Kusumaningrum, *Pengembangan Strategi Keamanan Produk Perikanan Untuk Ekspor ke Amerika Serikat*, Jurnal Standardisasi Volume 16 Nomor 2, Juli 2014: Hal 95 - 102, Badan Standardisasi Nasional, diunduh dari <http://ojs.bsn.go.id/index.php/standardisasi/article/view/170>, diakses tanggal 12 November 2016

⁹ Sidabutar, Victor Tulus Pangapoi. 2014. *Permasalahan yang Dihadapi UMKM Berorientasi Ekspor*. Jurnal Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI.

yang tidak dimunculkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Victor Tulus Pangapoi Sidabutar yaitu dengan melakukan analisis dari penetrasi internasional dan kemudian mengkaitannya dengan kondisi industri domestik untuk menjawab mengapa usaha kecil dan menengah di Indonesia banyak mengalami hambatan dalam proses perluasan pasar menuju pasar internasional.

Syamsul Huda dalam penelitiannya berjudul *Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Non Migas Indonesia*, menjelaskan Ekspor Indonesia sangat mengandalkan faktor-faktor keunggulan komperatif dalam penentu utama daya saingnya, terutama daya saing harga, seperti upah buruh murah dan sumber daya alam berlimpah sehingga murah pengadaannya. Namun, dalam era perdagangan bebas nanti, teknologi dan keahlian khusus yang merupakan tiga faktor keunggulan kompetitif semakin dominan dalam penentuan daya saing. Selain itu, dengan tuntutan masyarakat dunia yang semakin kompleks menyangkut masalah-masalah lingkungan hidup, kelestarian alam bersama isinya, kesehatan, keamanan, dan hak asasi manusia membuat faktor-faktor keunggulan komparatif semakin tidak penting dibandingkan faktor-faktor keunggulan kompetitif.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Syamsul Huda pada dasarnya sejalan dengan tesis ini, namun peneliti dalam tesis ini secara khusus memilih sektor perikanan sebagai objek kajian dan ditambah dengan analisis lebih dalam mengenai kondisi industri perikanan dalam negeri Indonesia dalam menjawab tantangan menciptakan kompetitif yang menjadi sasaran dari dilahirkannya kebijakan standardisasi mutu ekspor pada pasar internasional.

G. Kerangka Teoritik

1. Definisi Operasional

¹⁰ Huda, Syamsul, 2006, Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Non Migas Indonesia, Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi Vol.6 No.2 September 2006 : 117-124

Dengan mengembangkan konsep-konsep penelitian diatas peneliti secara khusus memberi definisi terhadap istilah-istilah yang muncul dari konsep penelitian yang digunakan selama penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Ratifikasi, adalah proses adopsi perjanjian internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi atau pengesahan suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Terdapat dua konsekuensi penting yang harus dicermati sebelum mengesahkan suatu perjanjian internasional, yaitu: *Pertama*, Negara harus menerjemahkan atau mentransformasikan kewajiban dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. *Kedua*, konsekuensi yang harus diperhatikan adalah kewajiban negara memberikan laporan ke suatu lembaga yang ditentukan dalam perjanjian internasional.
- b. Ekspor, merupakan kegiatan mengeluarkan barang atau produk dari Indonesia ke negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui *sales contract process*, dalam hal ini adalah pihak Eksportir dan Importir.¹¹ Secara garis besar, barang-barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam (migas), seperti: minyak tanah, bensin, solar, dan elpiji dan nonmigas seperti: 1) Hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya, ketela pohon, karet, kopi, dan kopra, 2) Hasil laut terutama ikan dan kerang, 3) Hasil industry, seperti kayu lapis, konfeksi, minyak kelapa sawit, meubel, bahan-bahan kimia, pupuk, dan kertas, 4) Hasil tambang nonmigas, seperti bijih nikel, bijih tembaga, dan batubara.
- c. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan

¹¹ Panduan Ekspor, diunduh dari <http://djpen.kemendag.go.id>, diakses pada tanggal 4 September 2016

teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

- d. Standardisasi, adalah segala usaha yang dilakukan dalam rangka menggunakan barang standar, khususnya barang yang diproduksi oleh perusahaan termasuk penentuan sistem, pemilihan barang standar, kebijakan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan program tersebut. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2014 Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan
- e. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, sistem manajemen, dan/atau kompetensi personel telah memenuhi Standar Nasional Indonesia tertentu atau persyaratan lain yang dibakukan. Sedangkan sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/institusi/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang atau jasa, proses, sistem manajemen dan/atau kompetensi personel telah memenuhi SNI dan/atau persyaratan lain yang dibakukan
- f. *Stakeholders* (pemangku kepentingan) adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dari unsur konsumen, produsen atau pelaku usaha, asosiasi usaha, pakar/cendekiawan dan pemerintah/regulator

2. Definisi Konseptual

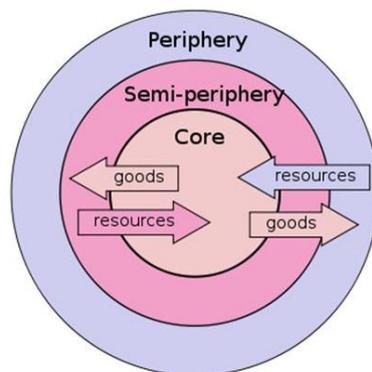
Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Teori ketergantungan yang juga termasuk teori struktural yang memihak kepada kemiskinan di dunia ketiga dan mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, maksudnya yakni negara yang kuat melakukan eksploitatif terhadap yang lemah. Maka dari adanya sifat yang merugikan negara yang

lemah surplus ekonomi dari dunia ketiga yang pada awalnya merupakan negara pra kapitalis atau negara yang memproduksi pertanian beralih ke negara industri yang maju.¹² Pendekatan Dependency pada dasarnya hendak menjelaskan persoalan kemunduran negara-negara bekas jajahan dunia ketiga dengan melihatnya dalam konteks global.¹³

Andre Gunder Frank adalah pakar sosiolog yang mendapat perhatian dari kajiannya mengenai teori ketergantungan. Teori ketergantungan berawal dari Amerika Latin yang banyak dieksploitasi sumber daya alamnya oleh negara industri maju atau kelompok pemodal dari Amerika Serikat dan Eropa. Teori ketergantungan merupakan cabang khusus dari teori-teori kapitalisme marxian. Andre Gunder Frank mengelompokkan Negara-negara di dunia menjadi dua kelompok yakni Negara-negara metropolis maju (*developed metropolitan countries*) dan Negara-negara satelit yang terbelakang (*satellite underdeveloped countries*).¹⁴

Gambar 4. Dependency Theory menurut Andre Gunder Frank



Sumber: Ratri Medya dan Wisnu Chandra Kristiaji. 2006, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, hal 82

Andre G Frank mengajukan tiga hipotesis melihat pola hubungan Negara-negara maju (metropolis) dan Negara-negara terbelakang (satelit),

¹² Blomstrom dan Hettne. 1984, *Development Theory in Transition, The Dependency Debate and Beyond: Third World Response*, London : Routledge, hal 17

¹³ Mohtar Mas' oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta; LP3ES;1990, hal. 204

¹⁴ Ratri Medya dan Wisnu Chandra Kristiaji. 2006, *Ekonomi Politik*, Jakarta : Erlangga, hal 82

yaitu sebagai berikut: 1) Dalam struktur hubungan antara negara-negara metropolis maju dengan negara-negara satelit yang terbelakang, pihak metropolis akan berkembang dengan pesat sedangkan pihak satelit akan tetap dalam posisi keterbelakangan. 2) Negara-negara terbelakang yang sekarang menjadi satelit, perekonomiannya dapat berkembang dan mampu mengembangkan industri yang otonom justru bila tidak terkait dengan metropolis dari kapitalis dunia dunia, atau kaitannya sangat lemah (tidak ada dominasi metropolis), 3) Kawasan-kawasan yang terbelakang saat ini, situasinya mirip dengan situasi sistem feodal di masa lalu, dimana ada kawasan yang memiliki kaitan yang kuat dengan metropolis dari sistem kapitalis internasional akan terlantar akibat adanya hubungan perdagangan internasional.¹⁵

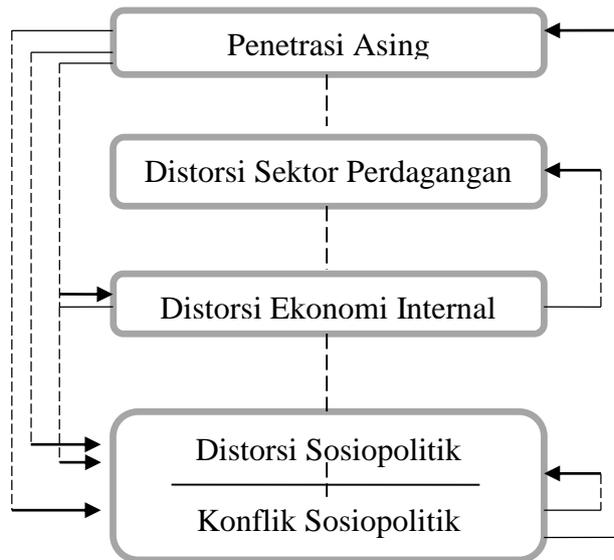
Pendekatan Dependency pada dasarnya hendak menjelaskan persoalan kemunduran negara-negara bekas jajahan dunia ketiga dengan melihatnya dalam konteks global. Teori ketergantungan pada umumnya juga mengabaikan faktor-faktor intern, seperti struktur sosial-budaya dan pola perilaku masyarakat prakolonial itu. Dengan menyalahkan kolonialisme dan neo-kolonialisme Barat sebagai faktor utama yang bertanggung jawab atas keterbelakangan daerah-daerah pinggiran tersebut dan atas masalah-masalah besar yang merintang pembangunan daerah-daerah tersebut, maka struktur sosial-budaya masyarakat-masyarakat prakolonial ini sebagai suatu faktor penyebab penting dari keterbelakangan mereka rupanya kurang diperhatikan oleh penganut teori ketergantungan.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa, menurut teori ini, tergabungnya secara paksa (*forced incorporated*) daerah-daerah pinggiran ke dalam sistem ekonomi kapitalisme dunia merupakan satu-satunya sebab dari keterbelakangan (*underdeveloped*) negara-negara sedang berkembang sekarang ini. Dengan demikian implikasi dan kesimpulan tersebut adalah bahwa tanpa kolonialisme dan integrasi ke dalam sistem ekonomi kapitalisme

¹⁵ Deliarnov, 2005, *Ekonomi Politik*, Jakarta; Erlangga

dunia, negara-negara sedang berkembang sekarang ini sudah berhasil mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan sangat, mungkin sudah dapat mengembangkan industri-industri pengolahan (*manufacture*) mereka atas usaha dan kekuatan mereka sendiri.¹⁶

Gambar 5. Model Sederhana Teori Ketergantungan



Sumber: Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, hal. 204

Kondisi ketergantungan adalah merupakan keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan ketergantungan terjadi bila ekonomi beberapa negara (yang dominan tentu saja) bisa berekspansi dan berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negara-negara tertentu (yang tergantung) mengalami perubahan tetapi hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif.¹⁷

Teori ketergantungan inilah yang kemudian menginspirasi masuknya perusahaan multinasional dari Negara maju yang melakukan ekspansi bisnis

¹⁶ Budiman, Arif (terj.) Frank, Andre Gunder, 1984, *Sosiologi Pembangunan Dan Keterbelakangan Sosiologi*, Jakarta: Pustaka Pulsar

¹⁷ Theotonio Dos Santos, 1970, *The Sctructure of Dependence*, American Economic Review, Vol 60 (2), h. 231

dan perluasan pasar dinegara-negara berkembang diseluruh dunia. Dalam kajian standardisasi, ketergantungan Negara berkembang muncul pada upaya mengimplementasikan kebijakan standar internasional dilevel domestik. Negara-negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi mengalami kesulitan untuk memenuhi standar internasional yang diminta, hal ini membuka kesempatan besar bagi investor asing dan MNCs untuk terlibat dalam aktifitas produksi dan ekspor di Negara berkembang. Salah satu contoh aplikatifnya adalah keterbatasan infratraktur membuat perusahaan domestik di Indonesia kesulitan memenuhi jumlah permintaan dengan kualitas produk yang konsisten baik dan harus dipenuhi dalam waktu cepat hanya dapat dilakukan dengan penggunaan mesin produksi berteknologi tinggi yang harganya sangat tinggi. Hal ini membuka peluang bagi masuknya investor dan MNCs untuk menyediakan fasilitas teknologi tersebut dan pada akhirnya kelompok investor ini akan memperoleh keuntungan dari aktifitas ekspor yang dilakukan oleh Negara produsen.

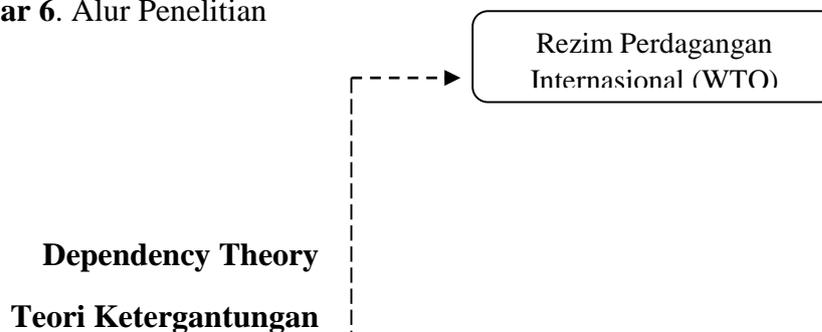
H. Hipotesa

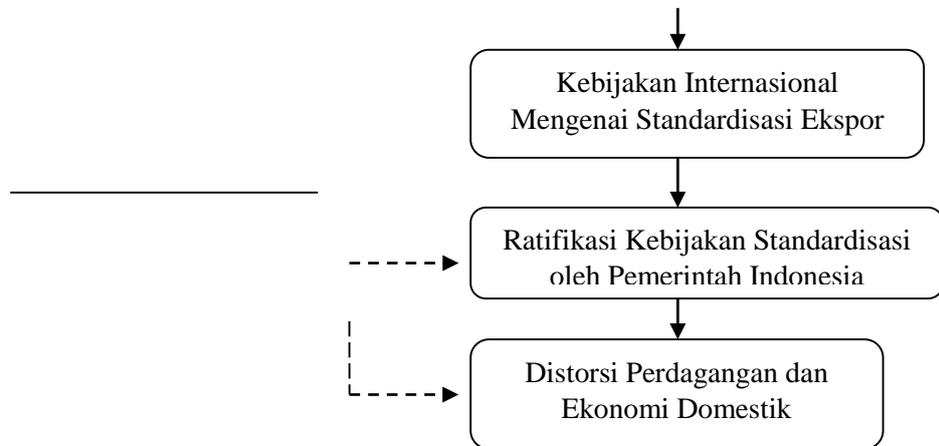
Hipotesa yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kebijakan internasional mengenai standardisasi mutu produk ekspor menghambat penambahan volume ekspor perikanan Indonesia karena minimnya kontribusi perusahaan kecil dan menengah di Indonesia akibat tidak mampu mengikuti standar pasar internasional yang menuntut tersedianya modal besar dan penggunaan teknologi dalam proses produksi hasil komoditi perikanan.

I. Alur Penelitian

Peneliti menentukan alur penelitian untuk mempermudah dalam proses pengumpulan dan analisis data serta membantu pembaca dalam memahami substansi penelitian. Alur penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Alur Penelitian





J. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang mendalam mengenai permasalahan penelitian.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Jenis data primer dan sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a) Sub Bagian Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Semarang
- b) Sub Bagian Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati
- c) Perusahaan UKM Perikanan berorientasi ekspor di Kabupaten Pati
- d) Data dokumen dan perpustakaan, berupa data dari website resmi, jurnal ilmiah, dan buku-buku literatur lainnya

3. Sumber Data

¹⁸ Sugiyono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit CV Alfabeta

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua sumber data untuk menyempurnakan analisis yakni sumber data primer dan data sekunder. Data Sekunder akan lebih menitik beratkan pada telaah pustaka *atau library research* yang akan di peroleh dari berbagai buku, dokumen, jurnal, koran, majalah, website dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian data primer akan dilakukan observasi lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada aktor-aktor yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga (3) macam teknik untuk melakukan pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Sutrisno hadi dalam Sugiono (2011) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, dua diantaranya adalah proses pengamatan dan ingatan. Dengan kata lain Observasi yaitu penelitian dengan melalui pengamatan insentif terhadap berbagai faktor sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan yang ada.¹⁹

Observasi terbagi dua, pertama observasi berperan serta merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang di teliti untuk dapat melihat dan memahami gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan dipahami oleh para warga yang ditelitinya dan kedua observasi non partisipan. Observasi non partisipan terbagi lagi menjadi observasi struktural dan observasi tidak terstruktur (Sugiyono 2011). Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan yang terstruktur, dimana peneliti

¹⁹ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta

sudah tau observasi yang akan diamatinya, mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan.²⁰

Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi sumber daya ekspor seperti, sumber daya pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan ekspor, sumber daya infrastruktur perusahaan sebagai salah satu syarat penunjang standarisasi, dan sumber daya lain yang mendukung ekspor, khususnya di Kabupaten Pati, sebagai daerah yang memiliki kontribusi ekspor komoditi non migas nasional yang cukup tinggi.

b. Wawancara

Menurut Denzin & Lincoln, wawancara merupakan suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan. Ini bukan merupakan suatu alat yang netral, pewawancara menciptakan situasi tanya jawab yang nyata. Dalam situasi ini jawaban-jawaban diberikan. Maka wawancara menghasilkan pemahaman yang terbentuk oleh situasi berdasarkan peristiwa-peristiwa interaksional yang khusus. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara semistruktur (*semistruktur interview*). Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Peneliti telah membuat struktur wawancara namun tidak menentukan batasan atas jawaban dari responden. Jenis wawancara ini digunakan untuk tujuan mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan pokok kajian penelitian serta mendapatkan informasi-informasi tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian.²¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber terkait dengan proses ratifikasi kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah dan implementasi kebijakan kepada stakeholder standarisasi ekspor.

²⁰ Ibid

²¹ Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Third Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²²

Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat bantu sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu: a) Pedoman Wawancara, pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pedoman Wawancara dalam penelitian ini terlampir dalam bab lampiran, b) Pedoman Observasi, pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara. Pedoman Wawancara dalam penelitian ini terlampir dalam bab lampiran, c) Alat Perekam, alat perekam berguna sebagai alat Bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

²² Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Data dokumentasi yang diperoleh merupakan data primer dan sekunder, dimana data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti dengan mendatangi objek penelitian dan data sekunder diperoleh dari sumber referensi yang memiliki validitas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1989) dalam Moleong (2004), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data berbeda dengan penafsiran data. Analisis data lebih memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.²³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif, langkah-langkah analisis yang sering digunakan untuk memahami komponen-komponen data adalah reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjabaran dari masing-masing langkah tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Reduksi Data, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perbaikan dan penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus, bahkan sebelum data terkumpul antisipasi akan adanya data yang sudah tampak, ketika memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, proses penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Pilihan-pilihan terhadap data mana yang diambil, mana yang dibuang, pola-pola apa yang dihasilkan atau cerita apa yang sedang berkembang merupakan pilihan analisis, sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik.
- b) Penyajian Data, penyajian data atau *display* data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun sekumpulan informasi yang diperoleh

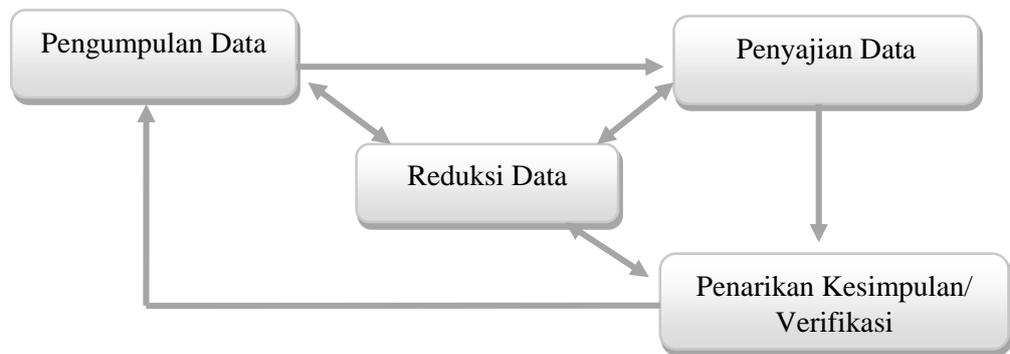
²³ Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

²⁴ Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press

dan diarahkan supaya memberi kemungkinan pada penarikan kesimpulan, verifikasi dan pengambilan tindakan.

- c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, penarikan kesimpulan/verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau ulang pada laporan-laporan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Dengan meninjau ulang laporan-laporan akan mempermudah dalam upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Gambar 7. Teknik Analisis Data



Sumber: Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press

K. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini akan dilakukan secara terstruktur dan tersistematis dengan bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis terhadap permasalahan yang menjadi pokok penelitian, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dibagi dalam beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, originalitas penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesa, alur penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis

BAB II: REGULASI INTERNASIONAL MENGENAI STANDARIDISASI MUTU PRODUK EKSPOR

Bab ini menjelaskan regulasi standaridisasi mutu produk ekspor yang dihasilkan oleh WTO dan organisasi standar Internasional lainnya dalam tatanan rezim perdagangan internasional serta secara khusus memaparkan regulasi ekspor perikanan di sejumlah negara atau pasar internasional yang menjadi target utama ekspor perikanan Indonesia

BAB III: KEBIJAKAN STANDARDISASI EKSPOR DI INDONESIA DAN DINAMIKANYA TERHADAP VOLUME EKSPOR PERIKANAN INDONESIA

Bab ini menjelaskan pelaksanaan standardisasi mutu produk ekspor di Indonesia, lembaga standardisasi dan memaparkan kondisi ekspor Indonesia di tengah diberlakukannya kebijakan standar mutu produk ekspor Internasional

BAB IV: ANALISIS KETERGANTUNGAN EKSPOR INDONESIA PADA REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARDISASI MUTU PRODUK EKSPOR

Bab ini menjadi kunci dari penelitian ini dimana dengan menggunakan teori ketergantungan peneliti akan menganalisis pelaksanaan kebijakan Standardisasi Mutu Produk Ekspor di Indonesia dengan memaparkan lebih detail kondisi produsen atau eksportir komoditi perikanan domestik dalam menghadapi tantangan standar pasar internasional.

BAB V: KESIMPULAN

Pada bab penutup ini merupakan bagian akhir penulisan tesis yang memuat kesimpulan dan saran, sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan